

Peran dan Strategi Indonesia bersama ASEAN Dalam Upaya Meredakan Konflik Laut China Selatan

Aditya Haryo Wahyudi

Abstract:

The conflict in the South China Sea which took place from 1992 until July 2016 needs to be immediately resolved. The Government of Indonesia has seen many stakeholders strived to alleviate the conflict in a peaceful manner. ASEAN as a regional forum for countries in the region has regarded that Indonesia would need a group support to confront China's increasingly unstoppable influence. It can be seen that in the South China Sea conflict, Indonesia has played a part in the formation of Declaration of Conduct between ASEAN and China, and also has established a trust building workshop with the participants. It is extremely important to note that efforts made by the Government of Indonesia in carrying out its role of leadership is absolutely necessary to build mutual trust among the ASEAN countries. Moreover, together with ASEAN, Indonesia would need to be able to continue working together in the face of pressure and influence coming from China.

Key words: *Indonesia, ASEAN, South China Sea, South China Sea Conflict, Territorial dispute.*

I. Pendahuluan

Konflik sengketa Laut China Selatan adalah konflik regional yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) seperti Indonesia, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina dengan Taiwan dan China sebagai pihak yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. dalam sengketa Laut China Selatan ini juga melibatkan negara hegemoni yang berkekuatan besar seperti Amerika Serikat, dan negara-negara bukan hegemoni lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan lainnya. Konflik wilayah yang berupa sengketa di perairan Laut China Selatan yang mulai memanas semenjak awal abad ke-21 di tahun 1992 sampai tahun 2016 ini telah mengganggu kestabilan politik di kawasan Asia Tenggara.

Sengketa ini berawal ketika China mengklaim wilayah *nine dash lines* termasuk didalamnya kepulauan Spratly dan Paracel semenjak akhir Perang Dunia II, dimana pada saat itu Jepang menyerah

dan kedua kepulauan tersebut dimasukkan ke dalam provinsi Guandong milik China.¹ Klaim China atas wilayah ini didasari oleh faktor-faktor sejarah China, dimana nelayan-nelayan China semenjak tahun 200 B.C.E. sudah menggunakan perairan ini sebagai wilayah untuk mencari penghidupan, terutama di kepulauan Paracel.² China mengklaim wilayah Laut China Selatan tersebut menggunakan *nine dash lines* atau dapat diartikan sebagai sembilan titik garis yang mencakup keseluruhan kawasan Laut China Selatan. Klaim China atas wilayah Laut China Selatan secara *unilateral* ini ditolak oleh beberapa negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam dan juga Filipina dikarenakan tumpang tindih dengan wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dari masing-masing negara, terutama Vietnam dan Filipina yang saling berebut dengan China atas kepemilikan kepulauan Spratly dan Paracel.

Laut China Selatan adalah sebuah kawasan yang memiliki jalur perdagangan yang ramai. Karena letak geografisnya yang strategis, Laut China Selatan sangatlah penting bagi perekonomian negara-negara di dunia. Negara besar seperti China, yang merupakan salah satu negara yang mengklaim kawasan tersebut sangat membutuhkan sumber-sumber daya yang terkandung di dalamnya. Sebagai negara besar, China menempati posisi pertama dalam penggunaan energi terbesar di dunia.³ Besarnya konsumsi energi yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian China tersebut tidak disertai dengan produksi bahan bakar yang berasal dari minyak ataupun gas bumi. Sehingga, hal itu mendorong China yang selama ini mengimpor bahan bakar berupa minyak dan gas mengklaim wilayah Laut China Selatan yang mempunyai kandungan minyak dan gas yang besar. Selain itu, Laut China Selatan merupakan kawasan yang dilewati oleh berbagai negara untuk mengangkut bahan-bahan energinya.

Menurut data dari badan *Energy Information Administration* (EIA) milik Amerika Serikat, Laut China Selatan diperkirakan mempunyai kandungan minyak sebanyak 11 miliar barrel, dan juga 190 triliun kaki kubik (tcf) gas alam. Perkiraan tersebut sangat mendekati total estimasi aslinya.⁴ Penggunaan minyak dan gas alam di berbagai negara di dunia merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan kedua hal tersebut dapat mendorong perekonomian dari negara tersebut. Sengketa wilayah yang terjadi di kawasan Laut China Selatan telah menyebabkan adanya kesulitan untuk mengetahui berapa jumlah total kandungan kedua sumber daya alam tersebut secara tepat.

¹ James W. Morley, Masashi Nishihara. 1997. "Vietnam Joins the World". New York: M.E. Sharpe. hlm. 124.

² Larry M. Wortzel, Robin D.S. Higham. 1999. "Dictionary of Contemporary Chinese Military History". Santa Barbara: ABC-CLIO. hlm. 180.

³ <https://yearbook.enerdata.net/#energy-consumption-data.html> Diakses tanggal 7 Juni 2016

⁴ <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS> diakses tanggal 8 Juni 2016

Kawasan Laut China Selatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai letak geografi yang sangat strategis. Sehingga, negara yang dapat mengendalikan kawasan tersebut mempunyai keunggulan dalam hal geopolitik. Keunggulan dari kawasan tersebut, yang membuatnya menjadi kawasan yang begitu strategis, adalah kawasan tersebut menjadi jalur utama dalam perdagangan energi bagi negara-negara besar di dunia, terutama di Asia. Lebih dari 90% perdagangan internasional di dunia terjadi melalui pengiriman komersial dan sebanyak 45% melewati perairan yang tidak mempunyai aturan di Laut China Selatan. Menariknya, Selat Malaka terletak pada salah satu ujung Laut China Selatan, yang mana merupakan jalur internasional tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz.⁵

Dikarenakan ramainya jalur pelayaran tersebut, maka kawasan Laut China Selatan ini seringkali dilewati oleh kapal-kapal militer. Kapal-kapal militer tersebut berasal dari negara-negara yang berbatasan dengan kawasan Laut China Selatan. Adanya kapal-kapal militer juga bertujuan untuk menegaskan kedaulatan dari wilayah masing-masing negara, dan juga untuk mencegah terjadinya aktivitas perompak yang sering terjadi di kawasan tersebut, walaupun kerjasama untuk melawan aktivitas perompak tersebut harus dilakukan bersama negara-negara rival yang sama-sama mengklaim wilayah tersebut.⁶

II. Kerangka Teoritis

Dalam hal ini, penulis menggunakan perspektif Realisme dalam hubungan internasional untuk menjelaskan situasi yang terjadi di Laut China Selatan saat ini. Perspektif Realisme itu sendiri beranggapan bahwa konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena sistem internasional yang anarkis dan tidak dapat diselesaikan sehingga hanya bisa diredakan. Perspektif Realisme dapat menjelaskan bahwa tujuan dari meredakan konflik adalah untuk menciptakan aman dan stabil, dan pada saat yang sama memposisikan suatu negara untuk mendapatkan kekuatan politik yang besar. Juga, perspektif Realisme sendiri mengatakan bahwa aktor negara dalam hubungan internasional merupakan aktor yang paling penting dan rasional, sedangkan aktor-aktor non-negara yang berbentuk *Intergovernmental Organizations* (IGO) hanya merupakan alat kepentingan bagi negara saja. Menurut penulis, teori Realisme menggambarkan situasi de-eskalasi konflik demi mewujudkan stabilitas kawasan yang ideal pada saat ini yaitu dengan menggunakan organisasi atau forum kerjasama internasional yang notabene merupakan aktor non-negara sebagai alat utama untuk mencapai kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya yang terlibat di dalam konflik. Teori

⁵ Rowan, Joshua P. 2005. "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute" dalam *Asian Survey* Vol. 45, no. 3. hlm. 415

⁶ David Scott. 2012. "Conflict Irresolution in the South China Sea" dalam *Asian Survey* Vol. 52, no. 6. hlm. 1041.

ini pun juga beranggapan bahwa negara merupakan aktor penggerak utama dalam sistem internasional, dan isu keamanan merupakan hal yang sangat penting.

III. Analisis

Dalam menjalankan perannya sebagai negara yang menengahi konflik Laut China Selatan, pemerintah Indonesia memiliki beberapa peran aktif agar konflik yang terjadi bisa mengalami de-eskalasi. Peran aktif pemerintah Indonesia sendiri sudah berjalan semenjak isu mengenai Laut China Selatan ini mulai muncul. Pada saat itu, langkah-langkah yang diambil pun juga bertujuan agar Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara, terutama di dalam ASEAN sebagai bentuk dari kepentingan nasionalnya. Peran aktif Indonesia dalam konflik ini yang utama adalah menjadi fasilitator untuk proses berjalannya de-eskalasi konflik, dan juga menunjuk diri sebagai mediator. Dari kedua peran aktif utama tersebut, Indonesia ingin melebarkan pengaruhnya, dan membuat Indonesia terlihat menjadi negara yang paling berpengaruh di ASEAN, dan juga *prestige* tersendiri sehingga negara-negara anggota ASEAN lainnya dapat bergantung kepada Indonesia.

Dengan adanya kepemimpinan dari suatu negara yang jelas di ASEAN, dalam hal ini oleh Indonesia, maka negara-negara anggota lainnya akan bisa setuju dengan ide upaya penyelesaian konflik secara kolektif ketika berhadapan dengan China. Apabila dilihat dari manfaatnya, pencapaian sebuah resolusi konflik bagi permasalahan di Laut China Selatan tidak saja bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga dalam hal politik dan keamanan.⁷ Selama ini, pemerintah Indonesia menunjuk diri sebagai mediator, dan juga sebagai fasilitator berjalannya perdamaian dalam konflik di Laut China Selatan tersebut, dan di saat yang sama melakukan pendekatan secara pelan-pelan kepada sengketa China dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Selain itu, salah satu bentuk peran aktif pemerintahan Indonesia dalam meredakan konflik di Laut China Selatan pada saat ini adalah dengan mengaggas terbentuknya suatu patroli bersama di Laut China Selatan. Dengan adanya patroli bersama yang diajukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, kolektifitas antara sesama negara ASEAN agar *Conflict De-escalation* dapat tercapai. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia ingin membantu meredakan dan memecahkan permasalahan Laut China Selatan ini secara kolektif, dalam artian bahwa seluruh negara-negara anggota ASEAN turut terlibat dalam negosiasi dengan China.

⁷ I Nyoman Sudira. 2014. "Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa" dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. hlm. 151.

Keterlibatan seluruh negara-negara anggota ASEAN seperti yang diharapkan juga termasuk negara-negara yang tidak ikut bersengketa dalam melawan China, seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos yang notabene memiliki hubungan diplomatik yang dekat dengan China. Dekatnya hubungan diplomatik antara Kamboja dengan China terlihat pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja terlihat secara segan untuk membahas permasalahan konflik Laut China Selatan. Tindakan Kamboja tersebut dapat menghambat proses penyelesaian konflik secara *multilateral*.⁸

De-eskalasi dengan membangun stabilitas dan keamanan pada kawasan secara *multilateral* merupakan sebuah hal yang harus dilakukan agar dapat mencapai konsensus, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas konflik tersebut baik untuk pihak yang terlibat sengketa maupun yang tidak terlibat dalam sengketa. Salah satu bentuk peran aktif pemerintah Indonesia adalah dengan mengajukan diri untuk menjadi mediator dalam perundingan, seperti saat konferensi ASEAN di Kamboja pada tahun 2012 yang lalu. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini pada forum-forum internasional.

Selain itu, salah satu bentuk sikap aktif pemerintah Indonesia yang telah diambil adalah dengan membuat suatu *Declaration of Conduct* (DOC) bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya dengan China pada tanggal 4 November 2002. DOC ditandatangani dalam konvensi yang diselenggarakan di Kamboja tersebut membuat pemerintah Indonesia semakin berkomitmen dalam menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut. Deklarasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia, terutama Menteri Luar Negeri RI, bersama Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menyepakati *ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea* pada tanggal 20 Juli 2012 agar tidak terjadi perbedaan sikap dan pendapat.⁹

Bentuk peran aktif Indonesia lainnya sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam menegakkan perdamaian di Laut China Selatan adalah dengan menyelenggarakan *workshop* setiap tahunnya yang bertemakan *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* semenjak tahun 1990. Penyelenggaraan *workshop* tersebut merupakan bagian dari *preventive diplomacy* agar tercipta kepercayaan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, dan mencegah konflik agar tidak terjadi secara berkelanjutan.¹⁰ Tujuan utama dari lokakarya ini adalah mengelola potensi konflik

⁸ Charmaine G. Misalucha. 2014. "Locating Southeast Asia in Debates on the South China Sea" dalam Murray Hiebert, Phuong Nguyen, Gregory B. Poling (ed.) *Perspective on the South China Sea Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute* Washington: CSIS. hlm. 112.

⁹ <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx> Diakses pada 7 Juni 2016

¹⁰ <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Lokakarya-Laut-China-Selatan-ke-21-Surakarta-9-11-November-2011.aspx> Diakses pada 7 Juni 2016

melalui kerjasama, memajukan *confidence building measures* untuk meningkatkan rasa saling percaya antara negara-negara yang terlibat sengketa, dan mendorong pertukaran pandangan terkait program dan proyek kerjasama pemanfaatan potensi di Laut China Selatan. Adanya *workshop* ini juga untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan ini. Penyelenggaraan *workshop* mengenai penanganan konflik ini pun merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dari perspektif Realisme untuk mendapatkan *prestige*, wibawa, dan juga pengaruh-pengaruh yang dapat menguntungkan Indonesia secara politik. *Workshop* ini juga merupakan salah satu bentuk nyata dari peran Indonesia sebagai fasilitator atas berjalannya perdamaian untuk mewujudkan stabilitas di kawasan.

Penulis berpendapat bahwa sikap aktif Indonesia dalam hal ini menurut konsep *conflict de-escalation* bisa dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia turut membantu dalam penyelesaian sebuah masalah yang menjadi isu internasional. Permasalahan tersebut harus bisa diredakan sebelum dipecahkan dan ditemukan solusinya, dan idealnya bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat. Apabila dilihat dari teori perspektif dalam Hubungan Internasional, sikap pemerintah Indonesia dapat dilihat melalui perspektif Realisme. Hal tersebut bisa dijelaskan ketika pemerintah Indonesia, melalui kepemimpinannya, mengajak pihak-pihak yang terlibat sengketa agar bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan mengedepankan kolektifitas ASEAN dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan.¹¹

Di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan berupa wibawa, *prestige*, dan juga pengaruh-pengaruh lainnya dari segi politik dalam kepemimpinannya itu. Dalam hal tersebut, terlihat bahwa peran aktor non-negara sangat ditekankan dalam upaya meredakan konflik di Laut China Selatan, dan untuk mencapai kepentingan nasionalnya di saat yang bersamaan. Aktor non-negara dalam hal ini merupakan instrumen yang tepat untuk bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia agar konflik di Laut China Selatan dapat mereda. Dengan meredanya sebuah konflik, maka dalam hal ini Indonesia berpotensi besar untuk diuntungkan karena peran kepemimpinan yang telah diambilnya. Selain itu, Penulis melihat hal yang beberapa waktu lalu baru saja terjadi di perairan Natuna membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih dihormati oleh beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Sehingga hal tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam melakukan peran kepemimpinannya di Laut China Selatan.

Pemerintah Indonesia sangat dinantikan kepemimpinannya, agar ASEAN bisa bergerak secara leluasa dan dalam menggunakan strategi *Hedging*. Strategi *Hedging* adalah sebuah negara

¹¹ <http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/06/17/indonesia-stresses-asean-common-stance-on-south-china-sea-consistent.html> Diakses tanggal 18 Juni 2016

memposisikan dirinya untuk memiliki opsi-opsi strategis lainnya yang berada di tengah-tengah. Penggunaan strategi *hedging* ini dilihat lebih menguntungkan Indonesia dan juga negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi China, dikarenakan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan *balancing* (sebuah negara yang memperkuat diri untuk bisa bersaing melawan negara yang lebih besar) dan juga tidak terlihat lemah apabila melakukan *bandwagoning* (sebuah negara yang notabene kecil ikut serta dengan negara besar untuk bersaing dengan negara besar lainnya).¹² Sehingga, ASEAN mempunyai banyak opsi untuk bekerja sama agar peredaan atau bahkan penyelesaian di Laut China Selatan bisa tercapai.

Walaupun keputusan dari *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang memenangkan Filipina telah dikeluarkan dan menganggap bahwa klaim China melalui *nine dash lines* tidak valid, pemerintah Indonesia dalam mengambil peran kepemimpinannya di ASEAN tidak bisa terlalu mengandalkan hasil keputusan PCA tersebut. Menurut Penulis, hal ini disebabkan oleh adanya tindakan-tindakan pemerintah China yang seakan-akan tidak menghiraukan adanya proses pengadilan tersebut. Sehingga, kemungkinan besar hasil keputusan dari PCA hanya memiliki dampak yang kecil dalam melakukan de-eskalasi konflik. Akan tetapi, bukan berarti hasil keputusan PCA sebaiknya dilupakan saja. Walaupun Penulis melihat bahwa hanya dampak yang tidak signifikan saja yang dihasilkan oleh keputusan PCA tersebut, akan tetapi hal tersebut juga bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia beserta ASEAN agar menjadi *leverage* untuk mendorong China agar mau menyelesaikan masalah secara *multilateral*. Sehingga hasil keputusan PCA yang mengatakan bahwa klaim China melalui peta *nine dash lines* itu tidak valid menurut hukum internasional akan tetap berguna untuk menghadapi China.

Dalam meredakan konflik di Laut China Selatan, telah banyak upaya yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut seperti diskusi-diskusi secara *multilateral*, pengajuan ke mahkamah internasional Den Haag, patroli bersama, dan sebagainya. Selain itu, melalui jalur hukum dapat ditempuh beberapa cara seperti Aribtrase, Penyelesaian yudisial, Negosiasi, mediasi dan konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Akan tetapi, apabila melihat perkembangan dalam konflik ini maka upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa adalah dengan melalui diskusi bersama secara *multilateral* melalui forum-forum kerjasama internasional. Dengan melakukan diskusi-diskusi bersama dalam forum-forum kerjasama internasional, maka stabilitas kawasan akan terbentuk dan ketegangan-ketegangan yang terjadi dapat diredakan untuk sementara. Karena konflik itu sendiri *by nature* pasti akan muncul kembali sesuai dengan perspektif Realisme. Dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan, forum

¹² http://www.glocom.org/debates/20060901_goh_understand/index.html diakses tanggal 20 Juni 2016

kerjasama internasional yang memiliki peranan besar adalah ASEAN dan juga forum yang bernama *ASEAN Regional Forum* (ARF).

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu forum kerjasama internasional yang beranggotakan berbagai negara yang telah menjalin hubungan kerjasama *multilateral* bersama ASEAN untuk membahas permasalahan mengenai isu keamanan dan perdamaian kawasan, terutama di kawasan Asia Pasifik. Keanggotaan ARF meliputi 10 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa serta beberapa negara di kawasan yaitu: Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor-Leste, Bangladesh dan Sri Lanka.¹³ ARF dalam melaksanakan fungsinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan keamanan dan juga meredakan konflik dilakukan melalui dialog-dialog *multilateral*. Dengan adanya negara-negara besar yang ikut serta dalam forum tersebut, ASEAN memposisikan dirinya untuk dikelilingi oleh negara-negara besar dalam menghadapi agresi China di kawasan Laut China Selatan.

ARF sendiri sebagai sebuah aktor non-negara menurut perspektif Realisme dalam hubungan internasional merupakan bentuk nyata dari strategi *Hedging*. Hal tersebut dikarenakan ARF beranggotakan negara-negara seperti Amerika Serikat, China sebagai pihak yang bersengketa, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya. Sehingga, dalam hal ini Indonesia yang selalu mengajak ASEAN untuk meredakan dan menyelesaikan konflik. Peran kepemimpinan Indonesia diharapkan untuk dapat memandu ASEAN dengan cara mengelilingi ASEAN dengan negara-negara besar, yang salah satunya merupakan China sendiri. ARF sendiri juga merupakan organisasi yang tepat untuk dimanfaatkan oleh Indonesia dikarenakan ARF didirikan mempunyai tujuan untuk membahas isu-isu internasional yang menyangkut permasalahan keamanan. Dengan demikian, proses dialog secara *multilateral* dapat berjalan. Selain itu, Indonesia sendiri dapat diuntungkan dan negara-negara anggota ARF tersebut bisa menghormati Indonesia. Dengan adanya dialog *multilateral* dalam forum ARF melalui penggunaan strategi *Hedging* ini, maka hal tersebut lebih menguntungkan karena ASEAN tidak akan terlihat lemah apabila menggunakan strategi *bandwagoning* dan lebih menghemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan dana yang besar demi memperkuat kekuatan seperti dalam strategi *balancing*.

Dalam hal ini, ASEAN bisa dimanfaatkan sebagai instrumen bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik di Laut China Selatan, terutama Indonesia sebagai bagian dari strateginya untuk meredakan konflik. Hal tersebut dikarenakan ASEAN merupakan organisasi yang dapat menyatukan pihak-pihak yang ikut berkonflik. ASEAN sebagai organisasi regional juga mempunyai tanggung

¹³ <http://kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx> Diakses tanggal 16 November 2016

jawab untuk mewujudkan stabilitas kawasan. Sehingga organisasi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai negara dalam mencapai kepentingannya.

Penyelesaian permasalahan melalui ARF dalam hal ini merupakan opsi yang terbaik karena dapat menguntungkan semua pihak. Keanggotaan ARF meliputi negara-negara anggota ASEAN dan beberapa negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, China sendiri yang ikut serta terlibat secara penuh dalam sengketa, Jepang dan Korea Selatan yang sama-sama mempunyai kepentingan yang cukup besar di kawasan tersebut, dan juga Rusia. Meredakan konflik untuk mencapai stabilitas kawasan melalui forum ARF juga dianggap sangatlah penting karena keseluruhan anggota ARF mempunyai andil kepentingan di dalam kawasan Laut China Selatan ini. Perkembangan apapun yang terjadi pasti akan mempengaruhi keseluruhan anggota terutama dalam hal perekonomiannya. Sehingga forum tersebut merupakan lingkungan yang ideal dalam menyelesaikan konflik internasional. Terlebih lagi, tujuan dari ARF sendiri dibentuk adalah agar dapat menjadi wadah agar penyelesaian konflik bisa tercapai.

Penyelesaian masalah melalui forum kerjasama internasional juga memiliki keuntungan tersendiri, dimana *preventive diplomacy* juga bisa dilakukan untuk mencegah konflik yang sudah ada agar tidak berkembang dan hasil dari keputusan yang ingin dicapai juga akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ARF mempunyai tujuan dimana *preventive diplomacy* dilakukan melalui cara-cara seperti dialog, diskusi bersama, dan juga mediasi. ARF sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah untuk pemecahan masalah percaya bahwa meredakan konflik untuk menyelesaikan konflik bisa dilakukan tanpa harus menggunakan cara-cara yang mengandung kekerasan.

Dalam perspektif Realisme, konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, upaya penyelesaian konflik menurut perspektif ini sudah sewajarnya bersifat *zero sum game*. Penyelesaian masalah secara damai untuk meredakan situasi konflik dengan mengikutsertakan aktor non-negara dan tidak terlalu merugikan negara lain juga memungkinkan, asalkan kepentingan nasional dari suatu negara untuk meningkatkan kekuatannya bisa tercapai. Sehingga bekerjasama agar perdamaian bisa tercapai juga dapat diterima oleh perspektif Realisme, asalkan negara-negara yang terlibat dapat terpenuhi kepentingannya nasionalnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui strateginya di dalam konflik Laut China Selatan adalah dengan menekankan sentralitas dan kolektifitas dari ASEAN. Secara politik, kepemimpinan Indonesia di ASEAN dapat menguntungkan Indonesia sendiri yang mana penulis melihat bahwa negara-negara anggota ASEAN lainnya dapat bergantung kepada Indonesia untuk memimpin ASEAN kedepannya. Hal tersebut dapat terjadi

apabila Indonesia berhasil memandu ASEAN dalam menghadapi China melalui organisasi-organisasi internasional.

Dalam melakukan sesuatu atau menjalankan sebuah tugas, bukan tidak mungkin jika menemukan suatu tantangan atas tugas yang diembannya. Demikian halnya dengan pemerintah Indonesia, Indonesia dalam kepemimpinannya di ASEAN juga mempunyai tantangan-tantangan yang harus dihadapi demi terselesaikannya Konflik Laut China Selatan. Dalam meredakan Konflik Laut China Selatan, Indonesia menghadapi beberapa tantangan salah satunya adalah tantangan yang berasal dari luar, kata luar di sini dimaksudkan yang berasal dari luar ASEAN. Tantangan yang berasal dari luar tersebut antara lain sikap China yang ingin menyelesaikan konflik secara *bilateral*. Pemerintah China sendiri enggan untuk berdiplomasi bersama ASEAN secara keseluruhan. Hal tersebut dapat menghambat upaya-upaya penyelesaian masalah dalam forum ARF. Dalam pertemuan ARF yang ke-12, disebutkan sebuah konsep penyelesaian masalah yaitu “*at the pace comfortable to all*” yang mana penyelesaian masalah harus disertai dengan kenyamanan dari masing-masing pihak yang terlibat. Akan tetapi, China sendiri dalam upaya ASEAN untuk meredakan permasalahan bersama-sama terlihat tidak nyaman. Sehingga China sendiri lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara *bilateral* saja antara China dengan negara-negara anggota ASEAN yang terlibat bersengketa. China sendiri mengharapkan ASEAN secara kolektif untuk tidak ikut campur dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan sehingga menyebabkan gagalnya sebuah pernyataan bersama bagi negara-negara ASEAN untuk terbentuk. Terlebih lagi dengan adanya upaya China untuk menekan Kamboja agar tidak ikut serta memperlumaskan konflik Laut China Selatan pada saat pertemuan ASEAN di Phnom Penh pada tahun 2012 yang lalu.¹⁴

Tantangan lainnya yang berasal dari luar ASEAN adalah bahwa adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Keterlibatan Amerika Serikat dianggap sebagai tantangan yang dapat menghambat proses de-eskalasi konflik dikarenakan kehadirannya yang sangat kontra dengan sikap pemerintah China dan juga sebagai pemegang *status quo* dari kekuatan maritim.¹⁵ Kehadiran Amerika Serikat di dalam konflik Laut China Selatan ini juga terlihat ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkunjung ke negara Vietnam pada tanggal 23 Mei 2016 lalu untuk mengangkat embargo senjata Amerika Serikat kepada Vietnam.

Bagi Indonesia sendiri, tantangan yang harus dihadapi adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan Natuna oleh nelayan-nelayan China. Sikap dari pemerintah

¹⁴ <http://thediplomat.com/2012/07/asean-summit-fallout-continues-on/> diakses tanggal 16 Juni 2016

¹⁵ Alice Ba. 2014. “Managing the South China Sea Disputes: What Can ASEAN Do?” dalam Murray Hiebert, Phuong Nguyen, Gregory B. Poling (ed.) *Perspective on the South China Sea Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute*. Washington: CSIS. hlm. 6.

China yang tidak menghormati wilayah kedaulatan Indonesia tersebut dapat memperburuk hubungan diplomatik antara China dengan Indonesia. Sehingga, hal tersebut dapat membuat terhambatnya proses diplomasi antara Indonesia beserta ASEAN dengan China untuk meredakan konflik di Laut China Selatan. Dalam tantangan tersebut, pemerintah Indonesia dalam menjadi mediator juga harus memperjuangkan kedaulatannya di wilayah perairan Natuna.

Menurut Penulis, tantangan lainnya bagi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian permasalahan di Laut China Selatan adalah kurangnya kolektifitas yang berjalan diantara sesama anggota ASEAN. Hal tersebut terlihat bahwa dalam meredakan masalah, beberapa negara seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar tidak ingin terlibat di dalam konflik tersebut. Ketiga negara tersebut notabene adalah negara-negara yang memiliki hubungan yang dekat dengan China sehingga memiliki ketidak-tertarikan atas penyelesaian masalah yang cepat.¹⁶

Selain itu, tantangan bagi Indonesia atas kepemimpinannya di ASEAN dalam upayanya untuk meredakan konflik adalah berkaitan dengan *Code of Conduct* (COC) ASEAN mengenai Laut China Selatan, dan implementasi DOC yang masih dapat dianggap kurang efektif. Pemerintah Indonesia sangat mendorong negosiasi mengenai COC tersebut agar ketegangan yang terjadi di kawasan Laut China Selatan ini bisa mereda. Negosiasi mengenai COC tersebut berjalan dikarenakan gagalnya DOC mengenai Laut China Selatan yang ditandatangani pada tahun 2002 yang lalu. Gagalnya implementasi dari DOC bisa dilihat dari sikap China yang agresif dan masih sama mengenai penerapan *nine dash lines* sebagai klaimnya di Laut China Selatan, yang dimana hal tersebut tidak didasari pada konvensi UNCLOS 1982 dan menyalahi DOC poin pertama. Sehingga, pemerintah Indonesia dalam hal ini berharap dengan adanya COC, setiap tindakan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut bisa diatur. Di saat yang sama, pemerintah Indonesia juga masih berusaha untuk mengimplementasikan poin-poin aturan yang terdapat di dalam DOC.

IV. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia dalam melakukan peran kepemimpinannya terlihat ketika Indonesia berusaha untuk menekankan kolektifitas ASEAN sebagai proses untuk meredakan ketegangan agar stabilitas dalam kawasan dapat tercapai. Keuntungan yang dapat dicapai adalah Indonesia dapat dipercaya sebagai negara yang mampu memimpin ASEAN jauh kedepan, yang dimana hal tersebut juga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling berpengaruh dalam politik di Asia Tenggara. Untuk mencapai hal tersebut organisasi ARF harus bisa diutilisasikan dengan baik.

¹⁶ Charmaine G. Misalucha, *op.cit.*, hlm 112.

Tantangan yang dapat menghambat peran Indonesia dapat berupa adanya negara yang tidak ingin mengangkat isu di Laut China Selatan ini menjadi permasalahan yang menyangkut keseluruhan anggota ASEAN. Tantangan lainnya yang dapat menghambat kepemimpinan dari Indonesia dalam hal ini adalah keterlibatan dari negara-negara besar itu sendiri. Negara besar seperti China yang terlibat dalam konflik di Laut China Selatan dapat menghambat penyelesaian masalah, dengan adanya keinginan dari China sendiri untuk menyelesaikan masalah secara *bilateral* saja.

V. Saran

Pemerintah Indonesia dalam menunjukkan kepemimpinannya harus mendorong keseluruhan anggota-anggotanya untuk mau bekerja sama secara kolektif. Indonesia harus bisa membawa negara-negara anggota ASEAN lainnya yang notabene memihak kepada China harus bisa melihat dampak negatif apabila China terus memaksakan kehendaknya atas Laut China Selatan. Dampak negatif dari sikap China yang melakukan upaya diplomasi secara bilateral saja dengan negara-negara yang bersengketa dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi dalam ASEAN, sehingga keseluruhan negara anggota ASEAN akan mendapatkan kerugian yang besar. Sehingga penyelesaian masalah secara multilateral merupakan hal yang harus diutamakan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga dapat mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara melebarkan pengaruh politiknya agar dapat Indonesia sendiri mendapat keuntungan secara politik, sesuai dengan perspektif Realisme.

DAFTAR PUSTAKA

Ba, Alice. 2014. "Managing the South China Sea Disputes: What Can ASEAN Do?", *Perspective on the South China Sea Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute*. Washington: CSIS

Misalucha, Charmaine G. 2014. "Locating Southeast Asia in Debates on the South China Sea", *Perspective on the South China Sea Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute*. Washington: CSIS

Morley, James W. dan Masashi Nishihara. 1997. *Vietnam Joins the World*. New York: M.E. Sharpe

Wortzel, Larry M. dan Robin D.S. Higham. 1999. *Dictionary of Contemporary Chinese Military History*. Santa Barbara: ABC-CLIO

Jurnal

Rowan, Joshua P. 2005. "The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute", *Asian Survey* 45, no. 3

Scott, David. 2012. "Conflict Irresolution in the South China Sea", *Asian Survey* 52, no. 6

Sudira, I Nyoman. 2014. "Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa". Bandung: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional

Website dan Media Online

CSIS, *Arbitration Timeline*, <http://amti.csis.org/ArbitrationTL/> (diakses 16 Juni 2016)

The Diplomat, *ASEAN Summit Fallout Continues On*, <http://thediplomat.com/2012/07/asean-summit-fallout-continues-on/> (diakses 16 Juni 2016)

Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, *Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on June 20, 2016*, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373744.shtml (diakses 24 Juni 2016)

The Jakarta Post, *Indonesia stresses ASEAN common stance on South China Sea consistent*, <http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/06/17/indonesia-stresses-asean-common-stance-on-south-china-sea-consistent.html> (diakses 18 Juni 2016)

Kementerian Luar Negeri RI, *Laut China Selatan*, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx> (diakses 7 Juni 2016)

Kementerian Luar Negeri RI, *Lokakarya Laut China Selatan ke-21, Surakarta, 9-11 November 2011*, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Lokakarya-Laut-China-Selatan-ke-21-Surakarta-9-11-November-2011.aspx> (diakses 7 Juni 2016)

Kementerian Luar Negeri RI, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, <http://kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx> (diakses 16 November 2016)

U.S. Energy Information Administration, *South China Sea*, <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS> (diakses tanggal 8 Juni 2016)